

## EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SINJAI

Izzatul Musyarrafa<sup>1\*</sup>, Andi Rosdianti Razak<sup>2</sup>, Muh. Yusuf<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the application of SIPD in Sinjai Regency. This research uses qualitative descriptive qualitative methods. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. The results of the research are the application of the Regional Government Information System (SIPD) to support the implementation of financial reports for the Sinjai Regency Food Security Service which began to be implemented in 2019, which was an initiation from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. The Regional Government Information System (SIPD) is planning for the Regional Apparatus Organization (OPD) for the next year and from that planning it can contain financial planning that can be used by the financial treasurer which will later become a budget work plan document and a list of budget implementers, then this document will be used by the treasurer in implementation. financial reporting of the Sinjai Regency Food Security Service. With the implementation of the Regional Government Information System (SIPD), it can be reported, informed effectively and efficiently in managing regional financial reports in a transparent and accountable manner and can speed up or make government work more effective.*

**Keywords:** *effectiveness, implementation of financial reporting, sipd application*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan SIPD di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi (pengamatan), wawancara (interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menunjang pelaksanaan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yang mulai di terapkan pada tahun 2019 yang merupakan inisiasi dari Kemenpan. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu tahun kedepan dan dari perencanaan itu dapat memuat perencanaan keuangan yang bisa digunakan bendahara keuangan yang nantinya menjadi dokumen rencana kerja anggaran dan daftar pelaksana anggaran kemudian dokumen tersebut yang akan digunakan bendahara dalam pelaksanaan pelaporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai. Dengan adanya penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat dilaporkan, terinformasikan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta dapat mempercepat atau mengefektifkan pekerjaan di pemerintahan.

**Kata kunci:** efektivitas, pelaksanaan, pelaporan keuangan, aplikasi sipd

---

\* izzatul@gmail.com

## PENDAHULUAN

Aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) digunakan disemua Instansi Pemerintahan Daerah dalam perencanaan penganggaran dan

program kegiatan dan sistem aplikasi ini memiliki peran penting dalam proses perencanaan penganggaran dan program kegiatan. Dengan adanya system aplikasi perencanaan penganggaran dan program kegiatan akan lebih fleksibel, optimal dan efisien diDinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

Dalam mengembangkan Aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) perlu memperhatikan aspek komunikasi yang sifatnya teknologi maupun non system komunikasi yang baik menjadi penentu dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Hal ini sangat berkaitan dengan informasi dalam setiap komunikasi sebagai tolak ukur pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), peran infrastruktur jaringan adalah hal dasar yang membentuk jaringan komunikasi dimulai daerah sampai pusat jaringan komunikasi dapat memudahkan aliran data sehingga terkumpul dalam pusat, data dan informasi dalam pengelolaan

yang menjadi informasi dalam pengambilan keputusan. Manfaat jaringan komunikasi juga dapat sebagai sarana untuk memperluas penyebaran informasi dari sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Teknologi informasi yang sangat mempengaruhi system pengolah data dan system informasi pada proses perencanaan penganggaran dan program. Untuk melakukan pengolahan data secara efektif dan efisien maka diperlukan system informasi terintegrasi yang cepat dan akurat sehingga dapat secara keseluruhan dan mampu mendapatkan informasi yang transparan. Melalui Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD.

Kemendagri Dalam Menunjang Pelaksanaan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai diharapkan dapat membantu dan meringankan proses perencanaan penganggaran dan program kegiatan yang berguna untuk memudahkan dalam penyusunan program kegiatan dan penyusunan anggaran. Awal penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah, inplementor SIPD menemui kendala karena tidak ada pelatihan resmi tentang SIPD yang diberikan sehingga untuk pelajar SIPD mereka inisiatif melakukan konsultasi kementerian dalam negeri. Berikut hasil

wawancara dengan A,P selaku analisis keuangan pusat dan daerah yang mengatakan: “sosialisasinya itu bukan kita ikut sosialisasi langsung. Bimtek/sosialisasi SIPD seluruh kabupaten bukan,tapi kita yang ada keinginan sendiri untuk mempelajarinya.Kalau pelatihan resmi belum pernah,hanya saja sering konsultasi langsung kemendagrinya”.(wawancara pada 29 juni 2022).

Diimplementasikannya sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) khususnya yang di kelolah oleh BPKAD dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel,efektif,efesien,dan transparan. Namun,pada kenyataanya diimplementasi SIPD di BPKAD.Ini tidaklah mudah dikarenakan aplikasi tersebut baru dan kurangnya pelatihan,pembagian tanggung jawab yang kurang berjalan dalam menangani OPD dan ada 8 OPD yang mengalami kendala teknis dalam menginput kedalam SIPD.

Menurut Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan "Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau

pencapaian tujuan" Selanjutnya Permata Wesh (1992 148) mengatakan Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk membrikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu Pertimbangan ekonomi, Pertimbangan fisiologi, Pertimbangan Psikologi dan Pertimbangan Sosial Menurut Richard M. Steers (1980 1), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output) Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut Bedjo Siswanto (1990.62) berarti menjalankan pekerjaan yang benar. Menurut Handoko (1997-7), Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Devung efektivitas adalah tingkat kemampuan untuk mencapai tujuan dengan tepat dan baik (Devung, 1988.25) Menurut kamus Administrasi perkantoran efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek yang dikehendaki

dalam suatu perbuatan (1981:24) Secara umum, efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Pengertian penerapan menurut JS Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Sedangkan menurut Riant Nugroho, penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan kesanggupan seseorang untuk menerapkan ide, tatacara ataupun

metode-metode, prinsip-prinsip dalam situasi yang nyata. Penerapan ini adalah merupakan proses berfikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman.

Sistem informasi manajemen (SIM) adalah sekelompok atau sekumpulan proses dimana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel & Hatta, 2009). Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Good Governance salah satunya adalah menyangkut "transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan keterbukaan informasi" (Remaja, 2017: 39).

Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah Informasi pembangunan daerah dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.

Profil pembangunan Daerah dirumuskan dari data hasil pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

## **METODE**

Berdasarkan judul penelitian Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Salim & Syahrudin (2014:41) Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.

Menurut Cholid Narbuko & Abu Achmad (2010:44) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang tidak berdasarkan dengan angka

yang telah di analisis.

Tipe penelitian ini adalah fenomologi dimaksud untuk memberikan penjelasan secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami, adapun masalah yang diteliti adalah Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemajuan suatu program salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan Badan pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Sinjai dan mendapatkan hasil bahwa sumber daya manusia telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tupoksinya dilihat dari lapangan kebanyakan yang mengoperasikan sistem informasi pemerintahan daerah adalah yang berusia muda yang mempunyai potensi dan kemampuan dalam pengoperasian

sistem informasi pemerintahan daerah, namun Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai harus lebih siap disaat terjadi pergantian kepemimpinan agar pada saat waktu penginputan data sudah dapat di input sehingga tidak terjadi keterlambatan, adapun dalam hal sumber daya sarana dan prasarana telah tersedia baik jaringan wifi, komputer dan alat penunjang lainnya sehingga badan pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Sinjai tidak kuatir lagi dalam penginputan data meskipun masih banyak kekurangan di dalam sisten informasi berbasis web ini.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah Menurut Permendagn No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pememntahan daerah informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggara pembangunan daerah Berdasarkan pasal 2 Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang system informasi pemerintah daerah (SIPD) Meliputi informasi pembangunan daerah informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah lainnya.

Untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam menunjang

pelaksanaan laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai adapun indikator-indikator dalam pencapaian indikator tersebut yaitu Login akum SIPD penyusunan RKA, Penetapan DPA. Validasi Data dan kendala-kendala yang dihadapi operator dalam penggunaan SIPD.

aplikasi SIPD diterbitkan langsung oleh Permendagri Menurut Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pemerintahan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah informasi keuangan daerah, dan informasi Pemenntahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara professional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan

Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya Sehingga terbitlah Permendagn Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah

Sistem informasi pemerintahan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat informasi perencanaan pembangunan daerah informasi keuangan daerah serta informasi yang memuat informasi pembinaan dan pengawasan pemenntahan daerah Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagn Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berkualitas inovatif dan cepat Dengan adanya system aplikasi perencanaan penganggaran dan program kegiatan akan lebih fleksibel optimal dan efisien di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan daerah mulai dan proses perencanaan penganggaran pelaksanaan

serta pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem informasi manajemen yang canggih sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah secara cepat tepat dan transparansi Peralatan Input merupakan bagian komputer yang memiliki peranan penting karena langsung berhubungan dengan user atau Operator Komputer.

Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang meminta seluruh Pemda untuk mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan Bahkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia terdapat beberapa regulasi terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang juga baru saja diterbitkan, serta aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagn. seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta yang terakhir adalah Permendagn 70 tahun 2019 tentang SIPD in yang memiliki tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan esuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau encapaian tujuan Efektivitas vartu suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan Efektivitas yaitu penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya dalam system informasi manajemen terdapat sekumpulan proses dimana data dapat diolah analisis dan ditampilkan supaya data itu bisa menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan keputusan serta merupakan alat yang berguna untuk penunjang dan penendalian operasi dalam suatu organisasi Adapun cara dalam penggunaan aplikasi system informasi pemerintah daerah SIPD yaitu: Login Akun Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Proses-proses dalam penggunaan Aplikasi SIPD pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai yaitu Masuk ke laman SIPD Kab/Kota Domisili Semua akun yang terdaftar pada SIPD Provinsi maupun yang terdaftar pada SIPD



Kab/Kota, dapat melakukan LOG IN pada SIPD kab/kota domisili. Pilih Perencanaan Pembangunan Daerah. LOG IN menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk akun Lembaga username adalah nomor NPWP Sedangkan untuk akun individu, username adalah NIP.

### **Login Akun Sistem Informasi Pemerintah Daerah**

Cara untuk mengakses Aplikasi SIPD Operator dapat melakukan login melalui website <https://sipd.go.id> Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dan kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksana yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis

pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah industri dan masyarakat saat ini yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

Sistem ini memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah Tujuan dan sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah baik di Provinsi Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas inovatif dan cepat. Namun agar

terwujudnya tujuan-tujuan tersebut harus diperlukan persiapan dan setiap satuan kerja perangkat daerah baik kesiapan sumber daya manusianya harus orang-orang yang berkompeten, dan sumber daya penunjang yaitu sarana dan prasarana.

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang, seperti dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan (SKPD) yang memuat kebijakan yang berisi tentang program dan kegiatan dalam 1 tahun. Berdasarkan Observasi ditempat penelitian Dokumen RKA yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi data perencanaan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Fungsi RKA-SKPD digunakan untuk menampung anggaran pendapatan, anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan

penghasilan, dan anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Pada prinsipnya, penyusunan anggaran di dalam RKA SKPD harus sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan masing-masing SKPD.

### **Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**

Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang dijalankan atau direalisasikan setiap tahunnya dalam bentuk Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang sebelumnya menjadi Dokumen rencana kegiatan anggaran (RKA) melalui proses yang panjang termasuk eksistensi dan validasi data

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) merupakan dokumen perubahan yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan negara adalah beralihnya konsep administrasi keuangan (*financial*

*administration*) ke manajemen keuangan (*financial management*). Hal ini memerlukan pembaharuan pada setiap fungsi manajemen, baik pada tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan. Semua fungsi diarahkan pada pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem informasi manajemen (SIM) adalah sekelompok atau sekumpulan proses dimana data dapat diolah dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan.

Berdasarkan Observasi ditempat penelitian Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yaitu dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan anggaran yaitu bendahara pengeluaran dinas ketahanan pangan kabupaten sinjai. Dokumen pelaksanaan anggaran DPA memuat alokasi anggaran yang disediakan oleh pengguna anggaran tersebut. Dokumen Pelaksanaan anggaran dipemerintah pusat disebut

Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD).

### **Kendala yang menghambat pgunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai**

Dalam mengembangkan Aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) perlu memperhatikan aspek komunikasi yang sifatnya teknologi maupun non teknologi mengoptimalkan system komunikasi yang baik menjadi penentu dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Hal ini sangat berkaitan dengan informasi dalam setiap komunikasi sebagai tolak ukur pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Jaringan Yang mendukung Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai.

Apabila komputer server mengalami kerusakan atau gangguan secara otomatis seluruh jaringan tidak berfungsi karena server merupakan pintu masuk dan sebagai sebuah pusat jaringan. Jadi apabila seluruh jaringan tidak dapat berfungsi berarti terjadi gangguan atau kerusakan pada server. Apabila terjadi kerusakan pada

komputer workstation berarti komputer yang digunakan tidak dapat masuk dalam jaringan sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server maupun komputer lain dalam jaringan.

Jaringan internet yang menghasilkan teknologi komunikasi keduanya Dengan terciptanya koneksi internet suatu peralatan berbasis antara komputer bisa terhubung satu sama lainnya sehingga membentuk suatu Jaringan internet yang sangat luas yang bisa dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu Peran infrastruktur jaringan adalah hal dasar yang membentuk jaringan komunikasi dimulai daerah sampai pusat jaringan komunikasi dapat memudahkan aliran data sehingga terkumpul dalam pusat, data dan informasi dalam pengelolaan yang menjadi informasi dalam pengambilan keputusan Manfaat jaringan komunikasi juga dapat sebagai sarana untuk memperluas penyebaran informasi dan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)

Teknologi informasi yang sangat mempengaruhi system pengolahan data dan system informasi pada proses perencanaan penganggaran dan program kegiatan Untuk melakukan pengolahan data secara efektif dan efisien maka diperlukan system informasi terintegrasi yang cepat dan akurat sehingga dapat

terintegrasi secara keseluruhan dan mampu mendapatkan informasi yang transparan Koneksi internet adalah Sebuah hubungan yang terjadi antara perangkat berbasis komputer seperti (Personal Computer, Smartphone, Modem, dll) dengan jaringan internet yang menghasilkan teknologi komunikasi antara keduanya Syarat yang harus dimiliki agar terjadinya koneksi internet adalah perangkat berbasis komputer harus memiliki suatu protokol yang bernama TCP/IP, tanpa protokol ini tidak akan memungkinkan terciptanya koneksi internet seperti yang di jelaskan di atas Dengan terciptanya koneksi internet suatu peralatan berbasis komputer bisa terhubung satu sama lainnya sehingga membentuk suatu jaringan internet yang sangat luas yang bisa dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas system informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Dinas ketahanan pangan kabupaten Sinjai yang mulai diterapkan pada tahun 2020 yang merupakan Inisiasi Kemenpan untuk menggantikan aplikasi sebelumnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yaitu perencanaan organisasi perangkat

daerah satu tahun kedepan dan dan perencanaan itu dapat memuat perencanaan keuangan yang bisa digunakan oleh bendahara keuangan yang nantinya menjadi dokumen rencana kerja anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran kemudian dokumen tersebut yang akan digunakan bendaham dalam pelaksanaan pelaporan keuangan dinas ketahanan pangan kabupaten Sinjai Dengan adanya penerapan system informasi pemerintah daerah (SIPD) dapat melaporkan terinformasikan secara efektif dan efisien dalam pengelolaan pelaporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta dapat mempercepat atau mengefektifitaskan pekerjaan dipemerintahan Penerapan system informasi pemerintah daerah (SIPD) sangat mendukung dalam pelaksanaan pelaksanaan pelaporan keuangan dinas ketahanan pangan kabupaten Sinjai karena motivasi digunakanya system informasi pemerintah daerah (SIPD) untuk mengsikronisasikan pelaksanaan pelaporan keuangan disetiap satuan kerja perangkat daerah dengan system keuangan pada kantor keuangan daerah dan tentu penerapan system informasi pemerintah daerah (SIPD) dapat mempercepat proses pelaksanaan pelaporan keuangan dinas ketahanan pangan kabupaten Sinjai dibandingkan

pelaksanaan pelaporan keuangan sebelumnya yang masih menggunakan system manual.

## REFERENSI

- Adani, M. R. (2020). *Sistem Informasi Manajemen Dan Manfaat Untuk Bisnis. Sistem Informasi Manajemen: Pengertian, Fungsi, Jenis Contoh* (Sekawanmedia.Co.Id)
- Haryono, A. H. (1998). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia).
- Anonim. (2020). *Hardware Komputer (Perangkat Keras) dan Fungsinya Beserta Gambarnya. Hardware Komputer (Perangkat Keras) dan Fungsinya Beserta Gambarnya*. Ilmuips.my.id - Maten Belajar Gratis (diakses pada tanggal 27 November 2021)
- Anonim. (2021). *Pengertian Sistem Informasi (SI) Menurut Para Ahli, Pengertian Sistem Informasi Tujuan, Fungsi, Komponen*. (Yuksinau. Id). Diakses Pada Tanggal 16 November 2021)
- Anonim. (2021). *Pengertian Dokumentasi, Fengkodean, Fungsi, Tugas, Manfaat.Pengertian Dokumentasi. Pengkodean. Fungsi. Tugas, Manfaat* (*adventuregamespubs.com*).
- Yanti, N. S., & Made, A. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 8(1)*.
- Arikunto, Suharsimi (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rincka Cipta.

- Wurara, C. N., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Hertati, D. (2020). Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahAN desa di Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), pp. 55-62.
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, H., & Effiyaldi, E. (2020). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas Pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 5(3), pp. 429-439.
- Hadjar, I. (1996). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.